



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Letkol. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp/Faks.(0721)703289

SURAT TUGAS MENULIS BUKU

No. B.733.a /Un.16/DS/PP.00.9/04/2020

Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menugaskan kepada:

Nama : Marwin, S.H., M.H.
NIP : 197501292000031001
Jabatan : Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Untuk menulis buku:

Judul : Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Waktu : April sampai Desember 2020

Demikian surat tugas ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 22 April 2020

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemendikbudaraan,





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarami 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 780887
Website: www.radenintan.ac.id dan www.fsh-iainradenintan.com

SURAT KETERANGAN MENULIS BUKU
NO. B.2184/UN.16/DS/PP.00.9/11/2020

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menerangkan bahwa:

Nama : Marwin, S.H., M.H.
NIP : 197501292000031001
Jabatan : Dosen Tetap Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Yang bersangkutan telah melaksanakan tugas menulis buku:

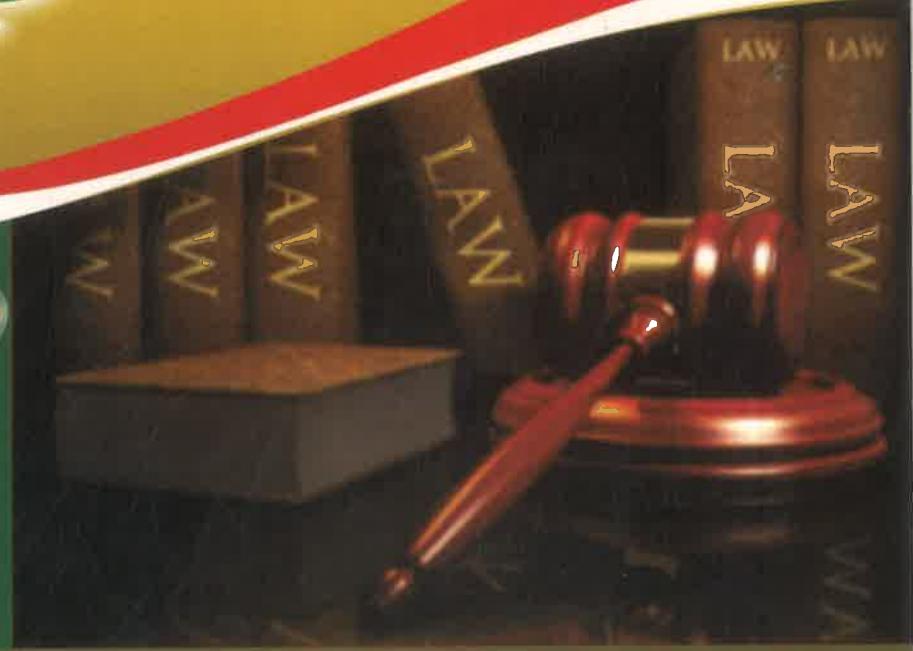
Judul : Ketentuan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
Waktu : April 2020 s.d. November 2020
Keterangan : Sudah selesai dalam bentuk cetak buku

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 17 November 2020

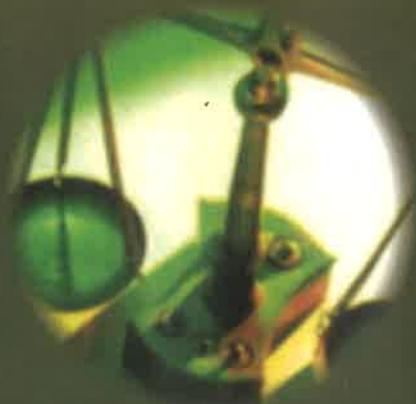


MARWIN



KETENTUAN TEKNIS

Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020

KETENTUAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

MARWIN



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2020**

KETENTUAN TEKNIS
PENYUSUNAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

**SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**

Assalamu'alaikum warahmatullahir wabarakatuh

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buku ini berupaya menyajikan perihal baik yang bersifat teoritis maupun teknis berkenaan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Materi yang disajikan dapat dikatakan sudah mencukupi semua aspek yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, materi muatan peraturan perundang-undangan, bahasa peraturan perundang-undangan, lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, teknis penyusunan kerangka peraturan perundang-undangan, dan teknis penyusunan materi muatan batang tubuh peraturan perundang-undangan.

Akhirnya, semoga karya yang sederhana ini bermanfaat, amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bandar Lampung, November 2020

Khairuddin

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum warahmatullahir wabarakatuh*

Alhamdulillah, ucapan syukur yang dalam penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, penulisan buku ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulisan buku ini merupakan bagian dari pelaksanaan kewajiban penulis melaksanakan tridharma perguruan tinggi selaku dosen pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dekan Fakultas Syariah atas kesempatan dan kepercayaan yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan pada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penulisan buku ini. Semoga Allah SWT menilai segala bantuan yang diberikan sebagai amal ibadah dan memberikan balasan yang terbaik.

Akhirnya dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangan, baik dari cakupan materi maupun dari teknis penulisan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca untuk memperbaiki buku ini dimasa mendatang. Semoga buku ini bermanfaat.

Wassalamu'alaikum warahmatullahir wabarakatuh

Bandar Lampung, November 2020

Marwin

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

PENDAHULUAN 1

HIERARKI DAN MATERI MUATAN 9

A. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan 9

B. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan 15

C. Materi Muatan Penyidikan dan Ketentuan Pidana 33

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 35

A. Lembaga Pembentuk 35

B. Tahapan Pembentukan 41

BAHASA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 57

A. Bahasa Hukum 57

B. Ragam Bahasa 61

C. Pilihan Kata atau Istilah 63

D. Teknik Pengacuan 64

TEKNIS PENYUSUNAN KERANGKA PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN 65

A. Kerangka Peraturan Perundang-Undangan 65

B. Teknis Penyusunan Judul 65

C. Teknis Penyusunan Pembukaan 66

D. Teknis Penyusunan Batang Tubuh 70

E. Teknis Penyusunan Penutup 73

F. Teknis Penyusunan Penjelasan 74

G. Teknis Penyusunan Lampiran 76

TEKNIK PENYUSUNAN MATERI MUATAN BATANG TUBUH

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 77

A. Teknis Penyusunan Ketentuan Umum 77

B. Teknis Penyusunan Materi Pokok 78

C. Teknis Penyusunan Ketentuan Pidana 79

D. Teknis Penyusunan Ketentuan Peralihan 81

E. Teknis Penyusunan Ketentuan Penutup 82

PENUTUP 85

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Malang: Setara Press, 2016.

A. Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Teori, Sejarah dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Bikameral*, Malang: Setara Press, 2015.

A.A. Oka Mahendra, *Pedoman Praktis Legal Drafting Panduan Teknis Merancang Peraturan Perundang-Undangan Secara Jelas dan Efektif*, Malang: Setara Press, 2017.

Ahmad Redi, *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

B. Hestu Cipto Handoyo, *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*, Yogyakarta: Universitas Atma jaya, 2008.

Backy Krisnayuda, *Pancasila dan Undang-Undang*, Jakarta: Kencana, 2016.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill.Co, 1992.

Bagir Manan dan Kuntara Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1997.

Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2018.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni, 2010.

H.A.S. Natabaya, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2019.

- Jazim Hamidi, Kemilau Mutik, *Legislative Drafting Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali pers, 2014.
- Junaiyah H. Matanggui, *Bahasa Indonesia Untuk Bidang Hukum dan Perundang-Undangan*, Jakarta: Grasindo, 2013.
- Khairuddin, M. Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujianya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017.
- Lilis Hartini, *Bahasa dan Produk Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2014.
- Lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan*, Depok: Rajawali Pers, 2010.
- M. Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- MPR RI, *Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.
- Muhammad Ishom, *Legal Drafting*, Malang: Setara Press, 2017.
- Nico Ngani, *Bahasa Hukum dan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.

Ni'matul Huda (editor), *Problematika Ketetapan MPR dalam Perundang-Undangan Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2015.

Nomensen Sinamo, *Ilmu Perundang-Undangan*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.

Putera Astomo, *Ilmu Perundang-Undangan Teori dan Praktik di Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.

Rachmat Trijono, *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2013.

Sirajuddin, Fatkhurohman, Zulkarnain, *Legislative Drafting Pelembagaan Metode Partisipatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Malang: Setara Press, 2015.

Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Yahya Ahmad Zein, Ristina Yudhanti, dan Aditia Syaprillah, *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*, Yogyakarta: Thafamdia, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 1950 tentang Jenis dan Bentuk Peraturan yang dikeluarkan Oleh Pemerintah Pusat.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.